

PENYELENGGARAAN ABSENSI BERBASIS ELEKTRONIK (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado)

Author

Gisella G. Ruauw¹, Goinpeace H. Tumbel², Monika Kawahe³, Elvis M. C. Lumingkewas⁴

e-Mail

gisellaruauw07@gmail.com¹, goinpeacetumbel@unima.ac.id², monika_kawahe20@gmail.com³
elvislumingkewas@unima.ac.id⁴

Affiliation:

Universitas Negeri Manado, Tondano,^{1,2,4} Universitas Sam Ratulangi³

Corresponding author

Monika Kawahe

Universitas Sam Ratulangi

Email: monika_kawahe20@gmail.com

Received: Juli 12, 2023

Revised: Nov 25, 2023

Accepted: Des 20, 2023

Available Online: Des 30, 2023

Abstract

The National Unity and Political Agency of Manado City has implemented electronic attendance with facial recognition. However, there are still many employees who are late in filling in absences and are not effective in carrying out the work as assigned. The aim of this research is to analyze the use of electronic-based attendance at the Manado City National and Political Unity Agency. The type of method used in this research is qualitative descriptive research using data collection techniques, namely: observation, interviews and documentation. The results of the research show that the use of electronic-based attendance at the National Unity and Political Agency can improve employee discipline, seen from work discipline which is revealed as a crucial aspect in improving overall human resource performance involving individual awareness and willingness to comply with social rules and norms, so that A holistic approach is needed in developing work discipline. The human resources dimension highlights the need for better understanding regarding technological developments, especially in the implementation of Electronic-Based Attendance. In the optimal supervision dimension, it can be guaranteed by direct and effective monitoring from the leadership, so that employee responsibility and work results can be improved. Supervision as monitoring and also as a process of analysis and adjustment aimed at achieving organizational efficiency and effectiveness.

Keywords: Usage, Attendance, Electronic Based, digital information technology

Abstrak

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado telah mengaplikasikan absensi elektronik dengan pengenalan wajah ini. Akan tetapi masih banyak pegawai yang terlambat mengisi absen serta tidak efektif dalam melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah ditugaskan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan absensi berbasis elektronik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah dapat meningkatkan disiplin pegawai, dilihat dari disiplin kerja yang terungkap sebagai aspek krusial dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan melibatkan kesadaran dan kemauan individu untuk mematuhi aturan dan norma sosial, sehingga diperlukan pendekatan

holistik dalam pembinaan disiplin kerja. Dimensi sumber daya manusia menyoroti masih perlunya pemahaman yang lebih baik terkait perkembangan teknologi, khususnya dalam implementasi Absensi Berbasis Elektronik. Pada dimensi pengawasan yang optimal dapat dijamin dengan pemantauan langsung dan efektif dari pimpinan, sehingga tanggung jawab dan hasil kerja pegawai dapat ditingkatkan. Pengawasan sebagai pemantauan dan juga sebagai proses analisis serta penyesuaian yang bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi.

Kata Kunci: Penggunaan, Absensi, Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan signifikan dalam ranah teknologi informasi digital memainkan peran sentral dalam meningkatkan produktivitas di lingkungan kantor (Burhan, 2018; Indrayani, 2012). Penyelarasan yang efektif antara teknologi informasi dan praktik kerja dapat menghasilkan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, disiplin kerja pegawai menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas penerapan teknologi informasi. Kesadaran akan kewajiban untuk mematuhi aturan dan regulasi menetapkan dasar bagi terciptanya tingkat disiplin yang tinggi (Musfirah, 2019; Pitriani, dkk, 2020), yang pada gilirannya berdampak positif pada produktivitas kerja.

Teknologi informasi digital yang berkembang pesat menjadi instrumen vital bagi pemerintah dalam menyediakan informasi dan layanan kepada warganya (Arifin, 2017; Feriyansyah, 2015). Penggunaan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan melibatkan berbagai aspek, termasuk penyediaan informasi, pelayanan publik, dan administrasi pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah implementasi sistem elektronik absensi (E-Absensi) berbasis online, yang dapat diakses melalui platform web atau aplikasi mobile. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan absensi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akurasi catatan kehadiran pegawai. Kunci keberhasilan pengintegrasian teknologi informasi dalam konteks pemerintahan adalah keterkaitan eratnya dengan aspek disiplin kerja. Disiplin yang tinggi mencerminkan kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks kinerja pegawai, disiplin ini menjadi faktor penentu bagi pencapaian produktivitas yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan kesadaran dan kedisiplinan pegawai merupakan langkah strategis dalam merespon dinamika teknologi informasi digital yang terus berkembang.

Era digitalisasi memacu pemerintah untuk terus berinovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat (Sellfia, dkk, 2021). Salah satu dampak positif dari perkembangan ini adalah adopsi sistem E-Absensi berbasis online. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengelolaan kehadiran pegawai, tetapi juga menginduksi atmosfer disiplin yang berdampak positif pada produktivitas. Kombinasi antara teknologi informasi dan kedisiplinan pegawai menjadi fondasi utama bagi pemerintahan yang efisien, responsif, dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat di era digital saat ini.

Era globalisasi kontemporer menandai percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan suatu realitas di mana inovasi teknologi berkembang dengan cepat. Fenomena ini terutama terlihat dalam domain media informasi dan telekomunikasi yang, dengan karakteristik tanpa batasan spasial, temporal, dan spasial, menghadirkan lanskap informasi yang terus berkembang. Adopsi gadget elektronik canggih di tengah masyarakat telah memberikan kemudahan bagi karyawan dalam

mendapatkan dan menganalisis informasi, mengilustrasikan transformasi signifikan dalam cara informasi diakses dan digunakan.

Pertumbuhan pesat teknologi di era globalisasi memainkan peran sentral dalam memperkenalkan perangkat lunak yang mendukung perolehan, pemeliharaan, pengendalian, dan pengolahan data. Pemanfaatan perangkat lunak tersebut bertujuan untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah dan efisien terhadap informasi. Manajemen data, sebagai elemen kunci dalam struktur sistem informasi, berfungsi sebagai perantara antara basis data dan berbagai komponen sistem lainnya. Fungsinya yang krusial adalah memastikan keakuratan, kelengkapan, keamanan, dan ketersediaan data yang diperlukan untuk operasional yang efektif. Teknik pengelolaan data yang semakin canggih menjadi penyambung antara progres teknologi dan kebutuhan informasi organisasi. Pengenalan disiplin karyawan sebagai respons terhadap kemajuan teknis membuktikan bahwa pekerjaan kantor dapat disederhanakan dan ditingkatkan produktivitasnya. Dengan pendekatan ini, pekerja kantor mampu menggunakan perangkat lunak untuk mengoptimalkan proses kerja, memberikan akses yang lebih mudah, dan memastikan integritas data yang dihasilkan.

Dalam kerangka kemajuan teknologi yang terus berlanjut, peran disiplin karyawan menjadi faktor kritis dalam mencapai produktivitas yang optimal (Baiti, 2020; Kiki, 2017). Perangkat lunak dan sistem informasi yang semakin kompleks membutuhkan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan memanfaatkannya secara efektif. Dengan demikian, implementasi teknologi di tempat kerja bukan hanya tentang adopsi perangkat keras dan perangkat lunak canggih, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan dan sikap yang mendukung transformasi positif dalam pengelolaan informasi dan peningkatan kinerja staf. Absensi elektronik, sebagai metode pelaporan kehadiran yang memanfaatkan aplikasi berbasis jaringan internet atau nirkabel, menandai kemajuan signifikan dalam pengelolaan presensi karyawan, pegawai, atau siswa. Prosedur ini melibatkan pengiriman data ke server melalui jaringan, yang selanjutnya diproses dan dimonitor. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam sistem ini, dijamin melalui enkripsi yang kuat dan penyimpanan sentral. Selain itu, integrasi dengan Teknologi Posisi Global (GPS) dan metode biometrik memberikan lapisan keamanan tambahan, yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kecurangan.

Absensi elektronik merupakan solusi yang memadukan teknologi informasi modern dengan keamanan tinggi untuk memastikan integritas pelaporan kehadiran. Dalam pengaturannya, sistem ini memanfaatkan jaringan internet atau nirkabel untuk mengirimkan data presensi ke server pusat. Penggunaan enkripsi data bertingkat memberikan perlindungan terhadap potensi ancaman keamanan. Lebih lanjut, keunggulan sistem ini terletak pada integrasi dengan Global Positioning System (GPS), yang memungkinkan verifikasi presensi karyawan secara akurat di lokasi yang dapat dilacak dengan tepat.

Penerapan teknologi Absensi Elektronik (E-Absen) mencakup aspek keamanan dan ketidakmungkinan manipulasi data. Sistem ini menyediakan metode verifikasi presensi yang canggih, terutama melalui integrasi GPS dan teknologi biometrik. Dengan demikian, posisi karyawan dapat diverifikasi secara efektif di tempat yang dapat diidentifikasi melalui sistem GPS, mengurangi risiko manipulasi data dan lokasi. Pemanfaatan teknologi ini menegaskan komitmen pada keakuratan dan keandalan data presensi. Keandalan dan keamanan Absensi Elektronik (E-Absen) terletak pada keberhasilannya dalam menggabungkan teknologi terkini dengan langkah-langkah keamanan yang canggih. Pengiriman data presensi melalui jaringan internet atau nirkabel memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien di server pusat. Fitur pengamanan yang melibatkan enkripsi data dan pemanfaatan Global Positioning System (GPS) serta biometrik menjadikan sistem ini sebagai solusi terpercaya untuk melacak kehadiran karyawan atau pegawai secara akurat dan terhindar dari potensi kecurangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ditegaskan bahwa penerapan sistem ini merupakan langkah strategis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip kebersihan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih bermutu dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, penerapan teknologi informasi menjadi fondasi esensial dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Penegasan terhadap pentingnya penggunaan teknologi dalam konteks perekaman kehadiran pegawai diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pencatatan Kehadiran. Pasal 3 dari peraturan tersebut memandatkan setiap pegawai untuk melakukan perekaman kehadiran melalui mesin presensi, yang dapat berupa sidik jari atau pengenalan wajah. Regulasi ini menandai pergeseran menuju metode perekaman yang lebih canggih untuk memastikan akurasi dan keamanan data kehadiran pegawai. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016, tertanggal 26 Juni 2016, memberikan penekanan tambahan terkait penggunaan absensi berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Surat tersebut menegaskan urgensi optimalisasi sistem absensi berbasis online elektronik sebagai langkah proaktif untuk mencegah terjadinya kecurangan dan/atau manipulasi data yang terkait dengan kehadiran pegawai. Melalui penggunaan teknologi, pemerintah berupaya menjaga integritas dan transparansi dalam mengelola data kehadiran pegawai.

Ketiga regulasi tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016, secara konsisten menegaskan pentingnya transformasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Langkah ini tidak hanya mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, tetapi juga

menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mencegah potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam proses kehadiran pegawai.

Dalam lingkup instansi pemerintahan, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk menunjukkan sikap disiplin yang luhur. Ketaatan terhadap seluruh peraturan dan norma yang berlaku menjadi bagian integral dari tanggung jawab mereka. Aspek kedisiplinan ini, salah satunya, tercermin melalui regulasi mengenai kehadiran, seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Walikota Manado Nomor 93/KEP/B.04/BKPSDM/2022 yang mengatur Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado. Ketentuan terkait kehadiran pegawai, sebagai bagian dari kedisiplinan PNS, ditegaskan dalam kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Manado Nomor 93/KEP/B.04/BKPSDM/2022. Dalam konteks ini, kehadiran pegawai diwajibkan untuk didokumentasikan melalui daftar hadir atau absensi. Pengisian absensi harus dilakukan secara terpisah pada saat kedatangan dan kepulangan, bukan simultan dalam jangka waktu bersamaan. Upaya ini tidak hanya sebagai bentuk kontrol kehadiran, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk meneguhkan prinsip kedisiplinan dalam lingkungan kerja.

Meskipun era digital telah memunculkan berbagai metode absensi otomatis, pemerintah mempertahankan kebijakan metode absensi manual untuk menghindari potensi kecurangan. Keputusan ini sejalan dengan keinginan untuk menjaga integritas dan akurasi dalam merekam kehadiran pegawai. Pemeliharaan metode manual sebagai langkah pencegahan menegaskan komitmen pemerintah terhadap kejujuran dan keadilan dalam pengelolaan kehadiran pegawai. Pada hakikatnya, setiap individu memerlukan pelayanan, dan pada konteks pemerintahan, pelayanan tersebut tak terelakkan dari kehidupan manusia. Dalam konteks administratif, regulasi terkait kehadiran pegawai menjadi landasan integral untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penekanan pada disiplin, termasuk ketentuan kehadiran, menjadi komponen penting dalam memastikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat.

Harapan masyarakat akan pelayanan publik yang unggul dan bermutu dari pemerintah tidak jarang bertentangan dengan realitas yang kompleks, mahal, lamban, dan melelahkan. Meskipun demikian, prinsip mendasar dalam amanah pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keinginan untuk menghadirkan pelayanan yang optimal bagi publik menjadi landasan utama yang perlu diwujudkan. Peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas tidak terbantahkan, dimulai dari formulasi kebijakan hingga implementasi undang-undang dan berbagai jenis layanan. Tuntutan yang semakin meningkat dari masyarakat memerlukan respons yang cepat dan efektif dari pemerintah, sehingga tata kelola yang efisien dan efektif sangat diperlukan. Keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima adalah parameter utama dalam mengukur kualitas dan keberlanjutan pemerintahan.

Evolusi kehidupan manusia yang semakin modern dan kompleks memberikan sorotan kritis terhadap peran pemerintah, terutama dalam hal pelayanan publik. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat, mengakibatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap aparatur negara sebagai pelaksana layanan. Tantangan ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan perannya sebagai abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang optimal demi mencapai prinsip good governance. Kritisnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia menuntut peran penting dari pemerintah. Di tengah dinamika ini, substansi administrasi memegang peran sentral dalam mengelola dan membimbing tindakan organisasi layanan menuju pencapaian tujuannya. Pengelolaan yang efektif dan terarah terhadap administrasi menjadi landasan integral bagi pemerintah dalam memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, serta untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada era perkembangan teknologi informasi, dua varian utama dari sistem absensi elektronik muncul, yakni melalui sidik jari (fingerprint) dan pengenalan wajah (faceprint). Mesin absensi sidik jari, sebagai salah satu bentuk biometrik, menggunakan metode pendeteksian melalui pencocokan sidik jari karyawan untuk merekam kehadiran mereka. Di sisi lain, pengenalan wajah merupakan teknologi yang mampu mengidentifikasi atau mengkonfirmasi identitas seseorang berdasarkan ciri-ciri wajah, seringkali diterapkan dalam berbagai teknologi termasuk sistem absensi dengan menggunakan metode pemindaian wajah.

Kantor Walikota Manado memperkenalkan suatu aplikasi absensi elektronik yang disebut Sistem Informasi Presensi (SIP) BKPSDM Kota Manado. Aplikasi ini merupakan suatu inovasi untuk memonitor kehadiran pegawai dengan lebih cermat. Salah satu fitur kunci dalam aplikasi ini adalah adanya titik koordinasi yang tak dapat diakali oleh pegawai. Artinya, seorang pegawai hanya dapat melakukan absensi jika berada dalam batas wilayah kantor. Pembatasan ini memastikan bahwa absensi dilakukan dengan integritas dan mencegah kecurangan terkait kehadiran pegawai. Penerapan Sistem Informasi Presensi (SIP) BKPSDM Kota Manado mengusung konsep ketat terhadap kedisiplinan pegawai dalam melakukan absensi. Sejalan dengan prinsip tersebut, pegawai hanya diperbolehkan melakukan absensi jika lokasi fisiknya berada di dalam kantor. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap aturan kehadiran dapat terdeteksi secara akurat. Rekapitulasi absensi yang dilakukan setiap bulan akan mengungkapkan ketidakpatuhan pegawai terhadap aturan kehadiran, memberikan sanksi yang sesuai.

Penggunaan teknologi absensi dengan pengenalan wajah (faceprint) dalam konteks aplikasi otomatis menonjolkan kemampuan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi individu berdasarkan ciri wajah unik. Dengan memanfaatkan teknologi ini, keakuratan dan keamanan dalam proses absensi dapat ditingkatkan. Penerapan sistem ini di Kantor Walikota Manado tidak hanya menjadi instrumen presensi,

melainkan juga menjadi alat efektif dalam menegakkan disiplin kehadiran pegawai, menghadirkan elemen transparansi dan kontrol yang signifikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Manado telah mengadopsi sistem absensi elektronik dengan teknologi pengenalan wajah. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi, di antaranya adalah tingginya tingkat keterlambatan dan ketidakefektifan pegawai dalam melaksanakan tugas. Fenomena ini mencerminkan bahwa implementasi Absensi Elektronik dengan Sistem Informasi Presensi (SIP) di BKBP Kota Manado masih mengalami hambatan dalam mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Meskipun BKBP Kota Manado telah melangkah ke arah absensi elektronik dengan pengenalan wajah, masih terdapat masalah signifikan yang perlu diatasi. Keberhasilan implementasi teknologi ini terhambat oleh tingginya angka keterlambatan dalam pengisian absensi oleh pegawai, yang berimplikasi pada kinerja yang kurang efektif. Contoh konkret adalah kurangnya pemahaman beberapa pegawai terhadap Sistem Informasi Presensi (SIP), yang merupakan kendala dalam penggunaan Absensi Elektronik.

Salah satu hambatan utama dalam efektivitas penggunaan Absensi Elektronik di BKBP Kota Manado adalah kurangnya pemahaman tentang perkembangan teknologi yang pesat di kalangan pegawai. Pemahaman yang minim terhadap aplikasi teknologi terbaru, seperti penggunaan SIP, memberikan dampak negatif terhadap penerapan Absensi Elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman teknologi di kalangan pegawai.

Kurangnya pemahaman teknologi di kalangan pegawai di BKBP Kota Manado dapat disebabkan oleh dua faktor utama: terbatasnya pengetahuan tentang perkembangan teknologi terkini dan adanya perbedaan generasional yang memengaruhi adaptasi terhadap perubahan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan Absensi Elektronik, perlu dilakukan edukasi yang menyeluruh, termasuk pelatihan intensif terkait penggunaan SIP. Pemahaman yang lebih baik tentang teknologi dan penggunaan Absensi Elektronik dapat ditingkatkan melalui pendekatan holistik yang memperhitungkan faktor-faktor usia dan tingkat pemahaman teknologi di antara pegawai BKBP Kota Manado.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam konteks ini adalah pendekatan kualitatif, yang mengedepankan proses investigatif dibandingkan dengan hasil akhir. Dalam pendekatan ini, urutan kegiatan penelitian bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kompleksitas gejala yang ditemui. Fokus utama adalah pada pemahaman holistik terhadap latar belakang dan individu yang menjadi objek penelitian. Keberhasilan pendekatan kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk meresapi dan menggali makna dari setiap detail yang diobservasi. Pendekatan kualitatif memiliki orientasi yang mendasarkan diri pada pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Fleksibilitas urutan kegiatan

penelitian menjadi karakteristik utama, memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap perubahan kondisi dan kompleksitas gejala. Dalam hal instrumen, penelitian ini mengakui peran peneliti sebagai alat utama yang tidak hanya melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap temuan.

Instrumen penelitian merupakan sarana yang vital dalam aktivitas penelitian, berperan sebagai alat pengukur dan pengumpul data. Dalam konteks penelitian ini, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, yang secara langsung terlibat dalam pengamatan, wawancara, pengumpulan data, serta analisis data. Peneliti sebagai instrumen menekankan peran subjektivitas dan kepekaan peneliti terhadap konteks penelitian, sehingga dapat merespon dinamika yang terjadi selama proses penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sejumlah alat bantu yang mendukung kegiatan penelitian, seperti catatan lapangan, perangkat perekam, dan kamera untuk keperluan dokumentasi. Catatan lapangan digunakan sebagai medium untuk merekam observasi secara langsung, sedangkan perangkat perekam dan kamera bertujuan untuk mendokumentasikan situasi atau kejadian tertentu. Kombinasi instrumen tersebut memperkaya metodologi penelitian, memberikan dimensi lebih dalam dalam menggali dan memahami konteks penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kehadiran karyawan di tempat kerja menjadi isu utama yang memerlukan perhatian dalam manajemen sumber daya manusia. Aspek-aspek terkait absensi, seperti pengisian absensi, pengajuan cuti, sarana pendukung, kesesuaian dengan tugas pekerjaan, kehadiran yang dianggap penting, tingkat disiplin, kejujuran, serta tanggung jawab, memiliki korelasi yang signifikan dengan motivasi kerja karyawan. Keterkaitan ini menandakan bahwa praktik-praktik terkait absensi bukan sekadar administratif, tetapi memiliki dampak substansial terhadap tingkat kinerja dan dedikasi pegawai.

Dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, implementasi sistem absensi berbasis elektronik telah menjadi bagian integral dalam upaya manajemen kehadiran pegawai. Meskipun terdapat beberapa hambatan, penggunaan teknologi ini telah membuktikan dampak positifnya terhadap kinerja pegawai. Proses mengisi absensi, pengajuan cuti, dan pelibatan dengan fasilitas pendukung menjadi lebih efisien, sementara tingkat disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab karyawan meningkat.

Kendati demikian, penggunaan absensi berbasis elektronik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari beberapa tantangan. Meskipun demikian, perbaikan terus dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk diakui bahwa sistem absensi elektronik membawa dampak positif yang substansial terhadap produktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu di lingkungan kerja.

Penerapan sistem absensi berbasis elektronik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan ketidakhadiran. Meskipun

masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, keberhasilan implementasi teknologi ini telah terbukti meningkatkan kinerja pegawai serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, penggunaan teknologi absensi elektronik dapat dianggap sebagai langkah strategis yang mendukung efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya manusia di lingkungan instansi tersebut.

Dimensi Disiplin Pegawai

Disiplin kerja merupakan suatu konsep yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, sehingga tujuan dari disiplin kerja dapat tercapai secara optimal. Dalam esensinya, disiplin kerja berperan dalam membentuk lingkungan kerja yang terstruktur, memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh karyawan. Salah satu aspek krusial dalam pengukuran disiplin kerja adalah tingkat kehadiran atau ketidakhadiran, yang mencerminkan aktivitas rutin pegawai dalam menunjukkan kehadiran atau ketidakhadiran mereka di lingkungan kerja. Tingkat kehadiran ini menjadi tantangan yang berkaitan erat dengan penerapan disiplin di setiap institusi.

Untuk mengatasi tantangan ketidakhadiran pegawai, penerapan Aplikasi Sistem Informasi Presensi (SIP) menjadi salah satu solusi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. Aplikasi teknologi ini dirancang untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan penerapan disiplin kerja. Namun, di Badan Kesatuan dan Politik Kota Manado, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya mentaati aturan dan tanggung jawabnya. Kendala ini menyoroti bahwa implementasi teknologi tidak selalu mencapai hasil optimal jika tidak diikuti dengan komitmen individu terhadap disiplin kerja.

Selain menjadi indikator ketidakhadiran, tingkat kedisiplinan juga menjadi penentu kinerja manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Konsep disiplin tidak hanya berfokus pada aspek kehadiran fisik, melainkan juga melibatkan kesadaran dan kemauan individu untuk mematuhi aturan dan norma sosial yang berlaku di lingkungan kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Malayu S.P Hasibuan, disiplin adalah ekspresi dari kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi norma perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menurut Hasibuan (2012), disiplin tidak hanya bersifat mekanis, melainkan lebih merupakan hasil dari kesadaran dan kemauan individu. Kesadaran mengacu pada pemahaman akan norma-norma dan tanggung jawab, sementara kemauan mencerminkan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan disiplin di lingkungan kerja tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi, tetapi juga membutuhkan pembinaan kesadaran dan motivasi individu untuk secara proaktif mentaati aturan dan menjalankan tanggung jawabnya. Dalam konteks Badan Kesatuan dan Politik Kota Manado, perlu dilakukan pendekatan holistik untuk memastikan disiplin kerja menjadi landasan kuat bagi efektivitas dan efisiensi operasional.

Dimensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, sebagai entitas yang memegang peran sentral dalam suatu organisasi, membawa dengan mereka sejumlah karakteristik yang unik, seperti akal, perasaan, dan keinginan. Berbagai atribut ini memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha organisasi dalam mencapai tujuannya. Meskipun demikian, aspek teknologi, perkembangan informasi, ketersediaan sumber daya finansial, dan bahkan tanpa mengesampingkan sumber daya lainnya, menjadi unsur krusial yang mendukung kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya.

Sumber daya manusia, sebagai pilar penting dalam dinamika organisasi, menampilkan ketersediaan akal pikiran dan kemampuan responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, situasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado menggambarkan keberadaan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami kemajuan teknologi, terutama dalam konteks Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik. Meskipun teknologi dapat memberikan kontribusi besar pada efisiensi organisasi, pengetahuan yang kurang di kalangan sumber daya manusia dapat menghambat optimalisasi potensi teknologi.

Pentingnya peran sumber daya manusia dalam konteks perkembangan organisasi tak terbantahkan, terutama dalam era teknologi informasi. Wikipedia menggambarkan sumber daya manusia sebagai elemen vital yang tak dapat dipisahkan dari struktur organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Namun, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, ketidapahaman sebagian sumber daya manusia mengenai perkembangan teknologi, terutama dalam aspek Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik, mengindikasikan perlunya upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Pentingnya pemahaman sumber daya manusia mengenai perkembangan teknologi, khususnya dalam aspek absensi berbasis elektronik, menandakan urgensi sosialisasi yang memadai. Wikipedia menekankan bahwa sumber daya manusia bukan sekadar elemen pelengkap, melainkan faktor vital dalam evolusi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan berulang dalam menyampaikan informasi terkini tentang penggunaan teknologi, sehingga sumber daya manusia dapat lebih memahami dan mengoptimalkan peran mereka dalam konteks perkembangan organisasi yang didukung oleh teknologi.

Dimensi Pengawasan

Pengawasan merupakan elemen integral dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara rencana dan pelaksanaan program. Keberhasilan suatu rencana atau program bergantung pada efektivitas pengawasan yang mengikuti, tanpa dukungan pengawasan, terdapat risiko lambat atau bahkan ketidakcapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami peran sentral pengawasan dalam manajemen, suatu prosedur dapat dirancang untuk memastikan kecocokan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diinginkan.

Supervisi, sebagai fungsi manajemen yang mendasar, mendeteksi dirinya sebagai faktor kunci dalam penyelesaian tugas dengan efisiensi. Pengawasan menjadi perangkat manajemen yang memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks aplikasi Sistem Informasi Presensi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, terlihat bahwa pengawasan belum mencapai optimalitasnya. Kurangnya pengawasan langsung dari pimpinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada kurangnya tanggung jawab yang dirasakan oleh pekerja terhadap hasil kerja mereka.

Pengendalian manajemen, konseptualisasi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, memperoleh status sebagai prosedur yang menjamin kesesuaian antara tindakan aktual dan aktivitas yang telah direncanakan. Fungsi kontrol membantu manajer untuk menilai efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan upaya kepemimpinan yang dilakukan. Konsep pengawasan dalam kerangka pemikiran Nawawi dijelaskan sebagai suatu proses yang mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan dan efisiensi pemanfaatan fasilitas kerja dalam mencapai tujuan organisasi. George R. Terry melengkapi pandangan tersebut dengan mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses yang mencakup penetapan standar, pelaksanaan, analisis pelaksanaan, dan modifikasi jika diperlukan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam konteks manajemen, pengawasan menjadi suatu proses esensial yang membutuhkan keputusan terinformasi. Terry menegaskan bahwa pengawasan melibatkan penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, dan modifikasi jika diperlukan. Secara keseluruhan, pengawasan menjadi instrumen yang memungkinkan manajer untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya sekadar pemantauan, melainkan proses analisis dan penyesuaian yang bertujuan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Manajemen kehadiran karyawan di lingkungan kerja, khususnya dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan dedikasi pegawai. Implementasi teknologi absensi berbasis elektronik telah membuktikan dampak positifnya terhadap efisiensi pengisian absensi, pengajuan cuti, dan pengelolaan sarana pendukung, sehingga meningkatkan tingkat disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab karyawan. Meskipun terdapat tantangan dalam penggunaan teknologi ini, perbaikan terus dilakukan untuk mengoptimalkan manfaatnya. Pentingnya disiplin kerja juga terungkap sebagai aspek krusial dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan. Disiplin bukan hanya terkait dengan kehadiran fisik, tetapi juga melibatkan kesadaran dan kemauan individu

untuk mematuhi aturan dan norma sosial, sehingga diperlukan pendekatan holistik dalam pembinaan disiplin kerja.

Kemudian pada dimensi sumber daya manusia menyoroti perlunya pemahaman yang lebih baik terkait perkembangan teknologi, khususnya dalam implementasi Absensi Berbasis Elektronik. Meskipun sumber daya manusia diakui sebagai elemen vital dalam dinamika organisasi, ketidakpahaman terhadap kemajuan teknologi dapat menghambat optimalisasi potensi teknologi. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pemahaman yang memadai. Terakhir, dimensi pengawasan menjadi kunci dalam memastikan keselarasan antara rencana dan pelaksanaan program. Pengawasan yang optimal dapat dijamin dengan pemantauan langsung dan efektif dari pimpinan, sehingga tanggung jawab dan hasil kerja pegawai dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, pengawasan bukan hanya sebagai pemantauan, melainkan juga sebagai proses analisis dan penyesuaian yang bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad Husni (2017) Internet, Ketimpangan Digital dan Kebijakan Inklusif. In: Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, pp. 3-25. ISBN 978-602-392-218-5 (e)
- Burhan, Ahmad Badari. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Ekonomi Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2), 233-247. <https://doi.org/10.46937/16201826338>
- Feriyansyah Feriyansyah, (2015), PEMBENTUKAN KARAKTER WARGA NEGARA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DI ERA DIGITAL, *HUMANITAS: JURNAL KAJIAN DAN PENDIDIKAN HAM*, Vol 6, No 1, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jh/article/view/10414/>
- Indrayani, Henni.2012, "Penerapan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Produktivitas Perusahaan." *Jurnal El-Riyasah*, vol. 3, no. 1, 1 Dec. , pp. 48-56, doi:10.24014/jel.v3i1.664.
- Khairunisa Nur Baiti, Djumali Djumali, Eny Kustiyah, 2020, Produktivitas Kerja Karyawan Ditinjau dari Motivasi, Disiplin Kerja dan Lingkungan pada PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta, *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, Vol. 4 no 1, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v4i01.812>
- Kiki, Ernawati (2017) PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN NON MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN TAHUN 2017. *STIKES BHM Madiun*, <http://repository.stikes-bhm.ac.id/393/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>

- Malayu Hasibuan, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia: edisi revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pencatatan Kehadiran
- Musfirah, Musfirah (2019) Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik dalam Menaati Tata Tertib Di MTs DDI Kaluppang Kabupaten Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/1218/1/14.1100.085.pdf>
- Nawawi. 2016, Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang komperatif (Kesembilan).
- Pitriani, Peti; Hendriana, Heris; Supriatna, Ecep, 2020, GAMBARAN TINGKAT KESADARAN KEDISIPLINAN SISWA SMP NEGERI 4 CIPEUNDEUY, FOKUS (Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan), VOL 3, NO 3 MEI, DOI: <https://doi.org/10.22460/fokus.v3i3.5672>
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sellfia, Novy Riesa; Usep Dayat, Lina Aryani, 2021, Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta, Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol 18, No 4
- Terry, George R, 2003, Prinsip-Prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.
- Walikota Manado, Keputusan Walikota Manado Nomor 93/KEP/B.04/BKPSDM/2022 yang mengatur Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado